



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, 2009. Jakarta. CV. Pustaka Al-Kautsar.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Inu, Kencana, 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Moenir, 2015. *Manajemen Pelayanan Umum cetakan 11*. Jakarta. Bumi Aksara
- Pasolong, Hasbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ratminto dan Atik, Septi Winarsih, 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Siswanto, Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sinanbela, Poltak Lijan, 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- WJS, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai pustaka
- Purdyatmoko, Sri, 2009. *Perizinan: Problem dan upaya pembenahan*. Grafindo: Jakarta.
- Ridwan, HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo. Jakarta
- Silalahi, Ulber, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama
- Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta
- Wasistiono, Sadu, (2002). *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*. Fokusmedia. Bandung



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibawa, Fahmi.2007. *Panduan Praktir Perizinan Usaha Terpadu*.
PT.Grasindo.Jakarta

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan kefarmasian

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dijelaskan tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1331/Menkes/Sk/X/2002. Tentang Pedagog Eceran Obat.

Keputusan Walikota Pekanbaru No 32 Tahun 2009 Tentang Pengintegrasian Pelayanan Perizinan, Standar Pelayanan dan persyaratan Pengurusan Pemberian izin.

Refrensi Lainnya:

Skripsi Jumarian Lestari.2016. *Analisis Prosedur dan Persyaratan Perizinan Pertambangan Batuan di Kabuapten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi Aidila Putri Yazir. 2016.*Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Perizinan Investasi Di Provinsi Lampung*. Universitas Lampung

Skripsi Amirullah Umar.2015. *Analisis Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Pinrang*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Skripsi Endah setiyorini.2013. *Analisis Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.